

GURU AGAMA KATOLIK MILENIAL DI PUSARAN PENETRASI DIGITAL DAN URGENSI PENDIDIKAN KRITIS¹

Marianus Mantovanny Tapung²

Abstract

Catholic religion teachers have important duties and responsibilities in building the nation's civilization. These tasks and responsibilities are becoming increasingly heavy and require information technology that is continuously being developed rapidly. To challenge this, Catholic religion teachers need to equip themselves with variety of knowledge and skills, including digital knowledge and skills also to apply in the world of Catholic religious learning in schools. Catholic learning is more fun, contextual and actual can be harmonized with various digital updates. In addition to making students increasingly understand the material of Catholic religion, but more than that, students are also able to avoid teaching materials with digital development. Catholic teachers can use a variety of digital media to help students live religious life in daily life, and instill these values in the era of digital development.

Key Words: Catholic religion teachers, information technology, digital knowledge and skills

Pendahuluan

Dewasa ini, interaksi antara ruang daring dengan kehidupan para milenial sudah sangat kuat. Begitu kuatnya penetrasi ruang digital ini sampai Marc Prensky dalam *On the Horizon* (2001) menyebut generasi zaman *now*/generasi

-
- 1 Artikel ini merupakan penyempurnaan dari makalah yang pernah dibawakan dalam Seminar dalam Rangka Wisuda Sarjana Stipas St. Sirilus Ruteng Tahun Akademik 2017/2018 pada tanggal 21 November 2018
 - 2 Doktor lulusan *cumlaude* pada bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Universitas Pendidikan Indonesia pada Agustus 2018, dengan judul disertasi: *Model Emancipatory Learning (Juergen Habermas) untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMP Mengenai Permasalahan Sosial dalam Pembelajaran IPS di SMP (Studi Pengembangan pada SMP/MTs di Kota Ruteng)*. Dosen STKIP Ruteng (2004-2015), selanjutnya pindah *homebase* ke STIKes St. Paulus Ruteng. Sekarang menjadi Ketua Senat Dosen STIKes St. Paulus Ruteng dan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) STIKes St. Paulus Ruteng. Sekretaris Eksekutif Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan 'Perennial Institute'. Saat bekerja sebagai tim seleksi nasional untuk calon komisioner Komisi Pemilihan Umum kabupaten masa tugas 2019-2024.

'Z' sebagai generasi 'digital sejak lahir' (*born digital*) atau 'generasi yang fasih berjaringan' (*net savvy*). Dalam konteks Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bagian Statistik Pemuda 2016 menunjukkan tingkat penetrasi internet kaum milenial, tertinggi pada kelompok umur 16-18 tahun, yaitu sebesar 62,32%; disusul kelompok umur 19-24 tahun sebesar 56,88 %, dan kelompok umur 25-30 tahun sebesar 41,00%. Sementara itu, telepon seluler menjadi primadona bagi pemuda untuk mengakses internet, terutama media sosial. Sebanyak 94,07% pemuda mengakses internet melalui telepon seluler, 35,63 % melalui laptop/notebook/tablet, 26,51% melalui komputer/PC, 3,16 % melalui media lain. Sebagian besar orang muda mengakses internet dengan tujuan bersosial media (facebook, twitter, instagram, dll) sebesar 88,35%; dan mendapatkan informasi/berita sebesar 75,02%. Angka-angka ini tentu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bila dikaitkan dengan banyaknya permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, penggunaan media sosial menjadi salah satu primadona penyebabnya. Dapat disimpulkan, sekitar 82% tindakan-tindakan fatal seperti bunuh diri, ujaran kebencian, tawuran, persekusi, pornografi, pornoaksi, dan lain-lain, yang terjadi di kalangan orang muda disebabkan karena penggunaan media sosial.

Data BPS ini sejalan dengan penelitian Petrus R. Jaya & Ambros L. Edu berjudul *Media Literacy and Critical Ability of Students at Manggarai Regency* (*Proceeding UNJ*, 2018). Penelitian ini menarasikan, tingkat kepercayaan (*level of trust*) orang muda Manggarai terhadap internet menembus hingga 86%. Orang muda Manggarai (mahasiswa) memiliki frekuensi berselancar dengan internet pada kategori sangat aktif, yakni sebesar 83%. Dari irisan besar ini, yang mengakses konten-konten seputar diskusi, analisis, opini, dan artikel sebesar 36%; yang mengakses berita-berita aktual sebesar 41%; sebesar 16% bermedia sosial. Dari hasil analisis, meskipun ceruk akses bermedia sosial kecil, tetapi sangat signifikan berdampak negatif pada kehidupan sosial orang muda. Banyaknya kejahatan maya dan dampak negatifnya, justru muncul dari ceruk yang kecil ini. Hal ini disebabkan karena **intensitas bermedia sosial ternyata tidak diimbangi dengan sikap kritis. Sebanyak 69% mahasiswa ketika mengakses informasi di media sosial langsung membagikan informasi tersebut tanpa melakukan analisis kritis terkait kebenaran informasi.** Mereka cenderung mengabaikan perbedaan informasi yang diakses, dan kurang mampu membedakan kualitas dan kredibilitas sumber. Mereka

terjebak dalam keinginan menyimpulkan suatu berita dari judul saja (*click bait*), dan bahkan begitu cepat menelan berita-berita bernarasi palsu (*fake news*) dan informasi-informasi palsu (*hoax*). Tak sedikit juga, karya-karya ilmiahnya dikutip dari sumber-sumber anonim, seperti blog/web, yang sebenarnya perlu dipertanyakan identitas publikasi, orisinalitas dan kebenaran akademis-intelektualnya.

Jaya & Edu menimpali, dampak turunan dari rendahnya sikap kritis di kalangan para pengguna media daring adalah tingginya kejahatan media (*cyber-crime*). Kejahatan ini merupakan akibat dari berita atau isu provokatif, aksi saling hujat dengan sebutan tak pantas (contoh dalam eskalasi politik nasional, muncul sebutan 'cebong' untuk pendukung Jokowi, dan 'kampret' untuk pendukung Prabowo), *share* video kekerasan, dan berbagai ujaran kebencian/tak elok. Mirisnya, bentuk-bentuk kejahatan media ini kerap dipertontonkan secara vulgar di hadapan publik, dan anak-anak kecil dapat dengan mudah meniru. Hal ini menyebabkan garis demarkasi antara yang pantas dan tidak pantas, yang baik dan tidak baik, yang menjadi urusan privat dan publik, menjadi hilang. Orang bisa melakukan apa saja dan di mana saja tanpa merujuk pada batasan usia, moralitas, norma dan hukum yang berlaku. Namun pada sisi lain, hilangnya limitasi privat dan publik justru menciptakan bias segregasi kehidupan sosial kemasyarakatan. Misalnya dalam kasus unggahan video 'Laos' dan 'Bela' yang menjadi viral beberapa bulan yang lalu, masyarakat Manggarai menjadi 'terpecah' dalam menyikapinya karena dibebani oleh polemik yang tak berkesudahan. Tentu ini sangat menyita waktu dan energi dan secara tidak langsung mengakibatkan rendahnya produktivitas.

Selain itu, viralnya dua video ini menarasikan secara terang benderang tentang minimnya peradaban kritis. Begitu cepat kita menggerakkan jempol untuk meng-*upload* video-video tersebut, lalu membagikan dan menanggapinya di media sosial, tanpa mempertimbangkan *legacy*, berikut dampaknya bagi kehidupan sosial. Sepertinya, kinerja kinestetik jempol kita lebih cepat beberapa langkah dari presisi kognisi dan kesadaran. Kita baru sadar dan menyesal setelah 'semuanya' menjadi viral, heboh dan sangat mengganggu kenyamanan bermasyarakat. Bisa diasumsikan, mereka yang terlibat aktif dalam skenario meng-*upload*, membagikan dan menanggapi video tersebut, sudah masuk dalam jejaring patologi sosial yang akut (Kartono, 2014).

Konon, Plato (427 SM-347 SM) dan Aristoteles (384 SM-322 SM) pernah mengatakan, bila kerja anggota tubuh lebih cepat dari kerja akal, maka peradaban manusia tersebut masih terbilang mentah. Psikoanalisis, Sigmund Freud (1856-1939) menambahkan, bila keinginan 'kerja' badan (*id*) lebih dominan menjajal kerja rasionalitas dan moralitas (*ego, superego*) maka akan menyebabkan peradaban kembali ke titik nadir. Peradaban nihil ini menjadi jembatan untuk berbagai kecenderungan merusak (*thanatos*) dan secara bawah sadar menghidupkan budaya kematian (*death culture*). Semuanya akan kembali menjadi barbar dalam bentuk dan manifestasi yang baru, karena dikuasai oleh keinginan-keinginan yang bersifat hewani. Video 'Laos' dan 'Bela' hanyalah penggalan kecil dari narasi besar tentang mulai terajutnya kembali peradaban yang degradatif, tercecir, kumuh dan barbar. Karl P. Popper dalam *The Open Society and Its Enemies* (1950) menegaskan, musuh yang membuat peradaban tercabik-cabik bukanlah perkembangan yang begitu pesat, namun rasionalitas dan moralitas yang belum matang untuk mendukung perkembangan tersebut. Sebenarnya, musuh (*Thanos*) yang paling ditakuti untuk peradaban adalah rasionalitas dan moralitas yang murahan. Oleh karena itu, perlu diperangi tanpa henti (*the infinity war*). Popper optimis dan menyakini bahwa dengan bersekolah, berdiskusi, bermusik, bersastra, berolah raga, belajar agama, berlatih perang, membangun pertemanan (komunitas) yang positif, menyebar informasi dan pengetahuan yang konstruktif, akan membantu memerangi bentuk-bentuk rasionalitas dan moralitas murahan yang bertendensi merusak.

Sementara jika ditilik dari sisi kesehatan, rendahnya sikap kritis terhadap intensitas penggunaan internet menyebabkan kecanduan psikis maupun fisik pada seseorang (Tempo, 25/02/2018). Kecanduan psikis akan membuat seseorang menjadi kurang empati, cepat depresi, gampang emosi, cepat mengambil keputusan, dan tak sabar menunggu hasil karena terbiasa berinteraksi dengan sesuatu yang instan. Secara fisik, kecanduan ini menyebabkan sel-sel otak lama kelamaan terdegradasi karena rangsangan yang berlebihan. Sel-sel otak yang kelelahan ini mengakibatkan turunnya konsentrasi dan berkurangnya memori. Penelitian di Cina (2012), bahkan menyebutkan otak pecandu internet ada kemungkinan mengalami perubahan kimia serupa dengan pecandu alkohol dan pecandu narkoba. Kesimpulan ini dibuat oleh para peneliti Akademi Ilmu Pengetahuan Cina di Wuhan, yang mengamati otak 35 laki-laki dan perempuan berusia 14-21

tahun. Mereka mendapatkan ada hubungan abnormal antara serabut saraf pada otak kelompok pecandu internet yang mirip dengan otak pecandu alkohol dan narkoba. Meski secara fisik mirip, tetapi menurut para ahli, kecanduan internet lebih susah ditangani ketimbang kecanduan narkoba/ alkohol (narkolema: narkoba lewat mata). Zat narkoba yang sudah terlanjur bersarang di tubuh bisa dihilangkan dengan memberikan obat, tetapi kalau kecanduan internet, tak ada zat yang bisa diluruhkan karena efeknya langsung pada memori. Obat-obatan yang diberikan dokter umumnya hanya untuk menurunkan *dopamin* dan depresi. Mungkin karena efeknya yang berat dan sulitnya pengobatan, maka Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan kecanduan internet ini sebagai penyakit internasional ke-11.

Guru (Agama Katolik) Milenial di Pusaran Penetrasi Digital

Ulasan Suara Pembaharuan (27/11/2018) menegaskan bahwa profesi guru sangat sentral dalam perkembangan teknologi yang serba digital saat ini. Meskipun terancam dengan adanya penetrasi digital dalam dunia pembelajaran, seperti *e-learning*, *embedded learning*, *hybrid learning*, *virtual classroom*, *mobile learning*, *long distance learning*, dan sebagainya., namun peran guru masih sangat penting. Sebab selain untuk mentransfer ilmu pengetahuan, guru juga berperan menanamkan nilai-nilai kehidupan serta keteladanan yang tidak bisa dipelajari dari saluran informasi mana pun.

Meski demikian, perlu disadari, dalam era digital ini semakin banyak tantangan yang harus dihadapi guru, termasuk guru Agama Katolik. Tantangan-tantangan tersebut (Bala, 2018), yakni: (1) Dunia semakin menuntut adanya pribadi yang kreatif, inovatif, kritis, mampu memecahkan masalah, dan memiliki *multiculture attitude*; (2) Kesuksesan bukan karena memenangkan kompetisi tetapi hasil kolaborasi (berjejaring), kematangan emosional spiritual, motivasi bekerjasama dan keterampilan berpikir kritis; (3) Kemampuan bersaing bukan lagi kepandaian tetapi kreativitas dan kecerdasan bertindak; (4) Keilmuan disebut bermanfaat jika bisa dibuktikan secara empiris faktual untuk kepentingan pemecahan masalah di masyarakat; (5) Peluang dan cara hidup makin bergantung pada kemampuan mengembangkan dan inovasi diri; (6) Model pengembangan kegiatan manusia makin mengarah pada *service industry* dan lebih khusus lagi akan didominasi oleh *creative industry* berbasis ICT; (7) Kesiapan dan kemampuan

beradaptasi dalam menghadapi berbagai bentuk *climate change* atau *global warming*; (8) Keterampilan beradaptasi dan bertransformasi dengan dengan fenomena disrupsi dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan bahkan agama; (9) Perilaku warga bangsa mengalami degradasi, seperti kurang mampu mengontrol emosi, keinginan, dan nafsu; penuh amarah, gampang marah-marah; melakukan tindakan kekerasan; melanggar hukum, peraturan, norma, dan kepatutan.

Dalam dunia pendidikan, narasi tantangan tersebut semakin spesifik, yakni: (1) Pendidikan mesti dikelola dan didesain secara profesional, terencana, terstandar dan terukur; (2) Pendidikan lebih difokuskan pada *character building*; (3) Pendidikan harus dibangun dan dikembangkan dalam konteks *multiculture competence*; (4) Pendidikan dikembangkan dengan berbasis teknologi informasi dan pengetahuan (*information technology and knowledge based*); (5) Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap ekologi, perubahan iklim, dan pemanasan global; (6) Pendidikan nilai menjadi alternatif membangun generasi muda; (7) Menumbuhkan dan mengembangkan *entrepreneurial mindset* (inisiasi, berani mengambil resiko, berani bertanggung jawab, dan mandiri); (8). Menumbuhkan dan mengembangkan komunitas belajar (*learning community*) dan pembelajaran berkolaborasi (*collaborative learning*).

Salah satu tantangan terbesar bagi guru adalah mengajar para milenial yang sudah sangat dekat dengan perangkat digital. Untuk mengimbangi ini, guru harus pula memiliki kemelekan (literasi) digital. Atau lebih tepatnya, guru mesti berani masuk dalam transformasi teknologi pembelajaran seperti *e-learning*, *hybrid learning*, dan lain-lain untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kepercayaan dirinya. Berkaitan dengan ini, Komisi Bidang Pendidikan Uni Eropa (2016) membuat penelitian mengenai hubungan peran teknologi, komunikasi, dan informasi (ICT) dengan peran guru dalam dalam pendidikan (Kompas, 8 September 2018). Mereka menyimpulkan bahwa ada korelasi yang positif dan konstruktif antara penguasaan teknologi dan rasa percaya diri guru ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Guru yang mampu menguasai ICT cenderung memiliki kepercayaan diri dalam membelajarkan materi di kelas. Mereka dapat membawa pengaruh positif bagi proses pembelajaran siswa secara menyeluruh. Dengan memanfaatkan ICT, mereka mampu mengakomodasi kecerdasan yang majemuk pada beragam siswa dan berpeluang mengembangkan potensi siswa secara lebih

baik sejak dini.

Ada beberapa alasan penting mengapa guru perlu bertransformasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital saat ini (Suara Pembaharuan, 27/11/2018). *Pertama*, guru-guru yang lahir pada era revolusi industri 3.0 ini, mengajar generasi yang lahir pada era berikutnya. Karena itu, setiap guru wajib mengikuti perkembangan sehingga tidak gagap dalam berteknologi. Komputer dan gawai mestinya sudah menjadi keseharian para guru. Media sosial dan sumber-sumber digital sebaiknya dimanfaatkan secara positif untuk pengembangan inovasi pembelajaran. *Kedua*, selain menguasai perkembangan teknologi, guru dituntut juga memahami kecenderungan perubahan teknologi. Revolusi industri pertama ditandai kemunculan mesin menggantikan tenaga manusia dan hewan. Generasi kedua ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran hingga muncullah pesawat telepon, mobil, pesawat terbang dan sebagainya. Generasi ketiga ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet. Pada revolusi industri generasi keempat ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, rekayasa genetika dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Muncul pola-pola baru ketika disrupsi teknologi hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan pola lama. Dengan mengikuti perkembangan teknologi, guru bakal mampu memberikan sudut pandang, alternatif, bahkan solusi kepada para siswa.

Ketiga, tantangan yang tak kalah penting dari para guru adalah bagaimana menjaga karakter kebangsaan yang potensial terkikis oleh berbagai ideologi mulai dari hedonisme hingga radikalisme yang tidak sesuai dengan Pancasila dan NKRI. Toleransi serta nilai-nilai Pancasila lainnya justru sangat strategis ditularkan oleh guru kepada murid. Kini ditengarai sudah muncul guru agama yang tidak mengajarkan toleransi, pentingnya hidup berdampingan secara damai, dan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan negara. Pada diri siswa ditanamkan nilai-nilai eksklusif, bahwa di luar kayakinannya adalah kafir. Di media sosial, guru malah ikut serta dalam gelombang ujaran kebencian atau ikut serta menyebarkan berita bohong. Intoleransi telah menyebar bukan hanya pada warga biasa yang minim pendidikan, melainkan juga mereka yang terpelajar, termasuk para guru. Hal ini terkonfirmasi dari Hasil survei nasional Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah (6/08-6/09/2018) yang menunjukkan data, 57 % guru di

Indonesia memiliki pandangan intoleran terhadap agama lain dan 46 % guru memiliki opini radikal (Tempo.Co, 16/10/2018).

Selanjutnya, kegandrungan pada teknologi oleh generasi Z kerap memunculkan tantangan dalam pembinaan karakter dan pengembangan keterampilan berpikir kritis atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berkaitan dengan perkembangan yang begitu pesat dalam bidang teknologi, siswa perlu diberdayakan sejak dini untuk berpikir kritis sehingga mereka memiliki keterampilan menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah, yang pada gilirannya dapat membentuk karakter yang kuat, memunculkan kreativitas dan inovasi. Benjamin Bloom dan David R Krathwohl dalam *Taxonomy of Educational Objectives* (1956) menegaskan bahwa pemberdayaan keterampilan berpikir tingkat tinggi (berpikir kritis) berkontribusi besar dalam membentuk karakter seseorang. Siswa tidak sekadar diajarkan untuk bertindak, tetapi mereka masuk dalam dialektika dan berusaha menentukan jalan keluar berdasarkan fakta yang terjadi, dan menghargai pola penyelesaian yang kritis, alternatif dan berbeda. Model pemberdayaan karakter kritis sangat sesuai dengan kebutuhan generasi milenial, di mana guru dapat menanamkan nilai-nilai penting dalam menghadapi perkembangan teknologi serta dampak-dampak yang terjadi. Pemberdayaan berpikir kritis mesti mengarah pada pemaknaan karakter diri, penemuan karya yang inovatif dan kreatif. Salah satu buah dari berpikir kritis adalah menemukan terobosan baru dengan karya-karya dan gagasan-gagasan yang lebih adaptif, kompetitif dan komparatif.

Dalam menghadapi tantangan milenial, selain pembentukan keterampilan berpikir kritis dalam diri siswa, guru juga (termasuk guru agama Katolik) perlu memiliki kualitas diri, sebagaimana yang dapat saya elaborasi dari uraian Howard Gardner (2007) mengenai Lima Pikiran untuk Masa Depan (*Five mind for the future*). Lima pikiran tersebut antara lain: (1) Pikiran terdisiplin (*disciplined mind*). Sebagai guru, setidaknya telah menguasai satu cara berpikir, suatu perilaku yang mencirikan disiplin ilmu, keterampilan atau profesi tertentu. Sebab dengan tanpa menguasai pikiran terdisiplin maka seseorang hanya akan mengikuti keinginan orang lain; (2) Seorang guru harus memiliki pikiran menyintesis (*synthesizing mind*) dengan mengambil informasi dari berbagai sumber, memahami dan mengevaluasi secara objektif, dan menyatukan dengan cara yang masuk akal bagi diri sendiri dan bagi orang lain; (3) Seorang guru mesti memiliki pikiran mencipta (*creating mind*),

di mana dia dapat memanfaatkan disiplin dan sintesis, menghasilkan hal-hal baru, dan memerlukan ide-ide baru, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tak terduga. Pikiran ini selalu menghendaki kemajuan selangkah lebih maju; (4) Seorang guru perlu memiliki pikiran meresppek (*respectful mind*). Dia mesti berupaya untuk memahami individu dan kelompok lain serta berupaya bekerjasama secara efektif dalam tatanan saling menghormati antara satu dengan lainnya; (5) Seorang guru mesti mempunyai pikiran etis (*ethical mind*). Pikiran ini mengonsepan bagaimana seseorang bisa mengejar tujuan yang berada di luar kepentingan pribadinya dan bekerja untuk kemajuan bersama.

Karena pendidikan memikul tanggung jawab yang sangat berat dalam membentuk dan menciptakan perilaku-perilaku atau pola-pola pikir yang diharapkan mampu memimpin masa depan menuju ketatanan yang lebih beradab dan bertanggung jawab, maka pikiran-pikiran tersebut harus dikembangkan dan ditumbuhkan melalui media pendidikan sepanjang hayat sehingga semua bisa beradaptasi mengikuti perkembangan kehidupan sepanjang zaman. Semakin berkembang tingkat pengetahuan sains dan teknologi maka semakin tinggi pula kemampuan manusia dalam mencipta. Dalam tingkatan tertentu manusia modern diwajibkan memahami dan mampu menggunakan teknologi dalam kehidupannya sebab tanpa penguasaan teknologi mustahil mereka mampu beradaptasi secara efektif dalam kelangsungan hidupnya. Pola-pola lama sudah seharusnya ditinggalkan dan diganti dengan pola baru yang sesuai dengan tuntutan sains dan teknologi. Globalisasi dan segala bentuknya dapat menenggelamkan manusia pada suatu situasi yang sangat buruk ketika mereka tidak mampu menerjemahkannya dalam kehidupan. Manusia tidak boleh mengorbankan seni dan humaniora hanya untuk mengejar sains dan teknologi. Kelima jenis pikiran ini merupakan suatu jawaban yang perlu dibina untuk menghasilkan pendidikan di masa yang akan datang. Kelima pikiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pribadi seseorang, termasuk dari pribadi seorang guru Agama Katolik.

Urgensi Pendidikan Berbasis Berpikir Kritis

Bertolak dari narasi empiris-faktual mengenai akibat negatif dari penetrasi media digital ini, maka sebagai orang yang bertanggung jawab dalam dunia pendidikan, saya hendak kembali menggagas adanya rekonstruksi tentang pendidikan berpikir kritis. Rekonstruksi gagasan ini bertujuan agar

para pemangku pendidikan dan para pelakunya dapat menyadari tentang pentingnya pendidikan berbasis berpikir kritis untuk diintegrasikan dalam sistem kurikulum dan konsep/praksis pendidikan. Dari segi psikologi usia belajar, kurikulum, dan materi pembelajaran yang ada di Indonesia, sekolah menjadi tempat yang potensial dan relevan dalam mengintegrasikan pendidikan berbasis berpikir kritis ini, terutama ketika dihubungkan dengan banyaknya permasalahan yang muncul sebagai akibat penggunaan media sosial.

Beberapa negara di kawasan Amerika, Eropa dan Asia telah intensif membahas pendidikan berbasis berpikir kritis ini, bahkan mereka dengan cukup progresif mengintegrasikan dan menerapkannya dalam sistem kurikulum, materi dan praksis pembelajaran, sejak mulai tingkat usia belajar dini sampai pada pendidikan tinggi. Setelah dievaluasi, kebijakan penerapan dan pengintegrasian pendidikan berbasis berpikir kritis ini, selain memberi dampak yang positif bagi pengembangan karakter kritis peserta didik, tetapi yang lebih penting, semakin berkurangnya patologi sosial yang diakibatkan karena penggunaan media sosial (Tapung, 2018). Ketika pendidikan berbasis berpikir kritis ini diterapkan, selain tujuan instruksional tercapai, di mana peserta didik memiliki penguasaan yang baik dari segi pengetahuan, tetapi juga tujuan nurturan, di mana mereka memiliki sikap dan keterampilan untuk menyikap secara kritis penggunaan media sosial, mengatasi berbagai permasalahan sosial, dan bersikap adaptif, inovatif dan humanis dalam menghadapi berbagai perkembangan teknologi dan informasi. Dengan demikian, permasalahan dapat ditekan dan kehidupan sosial semakin nyaman. Keadaan ini berdampak pada tidak terganggunya rencana pembangunan yang sudah diprogramkan oleh negara bangsa.

Sementara berkaitan dengan perkembangan digital, beberapa sekolah di negara tersebut sudah melakukan transformasi dan pengintegrasian dengan kurikulumnya. Bahkan sekolah-sekolah di Taiwan sudah mendorong adanya transformasi digital terutama dalam membangun kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) melalui penggunaan *smartphone* dan *smarttv*. Kecerdasan buatan ini bertujuan untuk mendukung dan mempercepat pembentukan kecerdasan alamiah dalam diri peserta didik. Kecerdasan ini juga menyokong kegiatan-kegiatan seperti *e-commerce* dan *digital economy* yang merupakan bagian dari semangat Revolusi Industri 4.0. Mereka menggunakan fasilitas kecerdasan buatan ini dalam skema seperti *augmented reality* dan *virtual*

reality sehingga peserta didik seakan-akan berada pada situasi yang autentik (Tempo, 15 Juli 2018). Kecerdasan buatan ini bahkan sudah dipakai untuk mengidentifikasi permasalahan seperti degradasi lingkungan hidup dan ancaman-ancaman yang ditimbulkan. Peserta didik kemudian diikutsertakan secara aktif dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan-tindakan praktis untuk mencegah dan menyelesaikan berbagai ancaman bencana, baik yang berkaitan dengan lingkungan fisik maupun sosial.

Narasi mengenai pengintegrasian pendidikan berpikir kritis di sekolah pada negara-negara maju di atas, cukup berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Payong dan Tapung (2017) tentang pembelajaran di SMP di Ruteng, Manggarai (Pos Kupang, 26/09/2017). Kondisi pembelajaran SMP di Kota Ruteng belum sepenuhnya berbasis berpikir kritis. Misalnya, survei yang dilakukan pada bagian kegiatan pembelajaran inti menunjukkan bahwa 42% dari 450 siswadari 8 sekolah berpendapat bahwa guru “tidak pernah” melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mampu merangsang keterampilan berpikir kritis; 34% siswa berpendapat “jarang”, 24% siswa berpendapat “kadang-kadang”. Sementara di pihak guru, 37% dari 38 orang mengatakan bahwa “tidak pernah” melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dapat merangsang keterampilan berpikir kritis, 27% mengatakan “jarang”, dan 36% mengatakan “kadang-kadang”.

Data penelitian ini berkorelasi dengan fenomena timbulnya berbagai degradasi sikap dan moral yang terjadi di kalangan anak usia belajar sekolah menengah. Informasi tentang banyaknya kejadian degradasi sikap dan moral ini merupakan hasil dari *Focus Group Discussion* bersama beberapa guru mata pelajaran di SMP se-kota Ruteng yang diadakan pada April 2017 (Payong & Tapung, 2017). Menurut para guru, ada 5 dari 10 siswa dari setiap kelas pada sekolah yang ada di kota Ruteng, yang terlibat dalam tindakan-tindakan destruktif seperti ujaran kebencian, kekerasan verbal, tawuran, persekusi, pornografi, pornoaksi, tindakan radikal, dll. Menurut mereka, sekitar 82-84% (sejalan dengan data BPS 2016) tindakan-tindakan destruktif ini disebabkan karena pengaruh perkembangan teknologi informasi, seperti fasilitas media sosial. Kontribusi yang negatif, baik secara manifest maupun laten dari media sosial terhadap kehidupan orang muda di kota Ruteng, didorong rendahnya keterampilan berpikir kritis. Orang muda begitu mudah tergiring, terprovokasi, dan bahkan teragitasi oleh informasi yang tersebar di media sosial. Mereka bahkan melakukan tindakan-tindakan fatalistik, melampaui

batas-batas etika dan moral yang telah digariskan dalam masyarakat, sekolah dan agama.

Penelitian di atas memberi gambaran, pembelajaran pada tingkat SMP di kota Ruteng belum sesuai dengan salah satu tujuan konsep dan praksis pembelajaran di sekolah menengah, di mana siswa harus memiliki kompetensi kritis agar dapat mengatasi berbagai permasalahan sosial. Padahal secara konseptual, kegiatan pembelajaran mesti menjadi wahana untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah. Pembelajaran yang memberdayakan keterampilan berpikir kritis akan menjadi basis pembentukan karakter bangsa yang kuat. Dengan demikian, masyarakat yang ada menjadi semakin beradab dan terhindar dari segala bentuk permasalahan sosial yang dapat mengganggu kehidupan serta memperlancar pembangunan dalam segala bidang, baik pada tingkat lokal maupun pada tingkat nasional.

Berpikir Kritis Merupakan Bagian Integral dari Pendidikan

Berpikir kritis itu sendiri merupakan salah satu keterampilan belajar (*learning skills*) yang harus dimiliki oleh peserta didik pada abad 21, selain keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi (Zevin, 2007). Sementara, berpikir kritis juga menjadi tuntutan ketika masyarakat dunia menghadapi beberapa ketegangan pada abad 21. Delors (1996) dalam *Learning: The Treasure Within*, mengangkat beberapa macam ketegangan tersebut, seperti ketegangan antara globalisasi dan lokalisasi, antara universalitas dan individualitas, antara tradisi dan modernitas, antara kompetisi dan solidaritas, antara akselerasi/ekspansi pengetahuan dan daya serap manusia, dan antara yang spiritual dan material. Berbagai ketegangan ini menuntut seseorang untuk mengembangkan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas dalam mengkritisi berbagai kondisi dan situasi sosial yang ada.

Menurut Kinch (1974) dalam *Social Problems in the World Today's*, ketika seseorang tidak memiliki kompetensi, kapasitas dan kapabilitas dalam mengkritisi berbagai kondisi dan situasi sosial yang ada, maka ada kecenderungan di mana berbagai permasalahan sosial secara faktual mengancam dan mengoyahkan secara sistemik tatanan kehidupan masyarakat. Kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, bencana alam, ledakan penduduk, kerusakan alam dan lain-lain merupakan permasalahan yang muncul sebagai akibat kancangnya arus globalisasi. Dalam hal ini, tidak ada

jalan untuk bisa terlepas dari berbagai masalah tersebut, kecuali *stakeholder* bangsa harus melakukan kajian-kajian dan tindakan-tindakan praktis. Demi mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, termasuk para pelaku pendidikan perlu bekerja sama secara sinergi.

Gelder (2005) menegaskan, pendidikan dalam segala perangkat dan bentuk kegiatannya menjadi salah satu andalan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi dan mengatasi permasalahan sosial di sebuah Negara bangsa. Banyak negara di dunia ini, termasuk negara-negara berkembang yang bisa mencegah dan mengatasi berbagai permasalahan social di negaranya, saat pendidikan diberdayakan secara optimal. Asumsinya, ketika pendidikan suatu negara maju maka peluang untuk memecahkan berbagai masalah akan sangat cepat, efektif dan efisien (Allen, 1987). Pendidikan menjadikan para peserta didik menjadi cerdas, memiliki kompetensi, kemampuan teknis dan social, *hard skills* dan *soft skills*. Mereka diberdayakan untuk terampil berpikir kritis sehingga dapat membuat analisis, sintesis, evaluasi, memberi keputusan dan solusi terhadap berbagai persoalan, baik dalam dirinya, maupun lingkungan sosialnya (Newmann, 1991). Pendidikan dan praksis pembelajaran yang memberdayakan kemampuan berpikir siswa akan berkontribusi pada pembentukan tatanan social yang kuat untuk satu negara, termasuk terlibat dalam berbagai upaya untuk memecahkan berbagai permasalahan social (Henderson & Hurley, 2013). Pendidikan memiliki kekuatan penting untuk memecahkan berbagai persoalan sosial yang menghantui kehidupan masyarakat di dunia berkembang, dengan melibatkan siswa dalam mengatasinya (Halx & Reybold (2005).

Bertrand Russel di *Education for Democracy* (1939) mengulas, bangsa yang kuat tatanan socialnya tidak terlepas dari upaya pendidikan kritis dalam membentuk karakter masyarakat sekolahnya. Dengan membangun karakter kritis, peserta didik akan menjadi manusia rasional-kritis untuk membahas berbagai kepentingan pembangunan negara demokrasi, termasuk menyelesaikan permasalahan sosialnya. Habermas (2002) dalam *Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity*, mengungkapkan bahwa yang menjadi bagian dari penyebab munculnya berbagai permasalahan sosial dan sulitnya untuk keluar dari permasalahan tersebut adalah bentuk-bentuk irasionalitas warga masyarakat. Menurut

Habermas (Eriksen, 2004) masyarakat yang rasional kritis mesti diberdayakan dalam mengatasi berbagai bentuk irasionalitas tadi dengan pendidikan dan pembelajaran kritis di sekolah-sekolah. Pengetahuan dan sikap kritis siswa dibentuk sedemikian rupa, dan kemudian mereka menjadi yang terdepan untuk melakukan transformasi. Menurutnya, perlu dibangun cara belajar emansipatoris (cara belajar membentuk peradaban) yang memberi ruang bagi tumbuh kembangnya keterampilan berpikir kritis. Oleh karena itu, Habermas menegaskan, gagasan pendidikan kritis senantiasa perlu dikembangkan untuk membantu tumbuh kembangnya keterampilan berpikir kritis tersebut.

Rekonstruksi Gagasan Pendidikan Kritis

Gagasan tentang pendidikan kritis dapat dimulai dari dialektika pemikiran antara mazhab Frankfurt dan Postmodernisme (Callawaert, 1999. Morrison, 1995). Mazhab Frankfurt memiliki gagasan dan keyakinan bahwa proyek modernisme bertitik tolak pada asumsi perlunya meletakkan fondasi dasar bagi kehidupan masyarakat modern dengan bertumpu pada universalisme akal, hak dan otonomi individu. Sedangkan, postmodernisme, kebalikannya, tidak meyakini apa yang disebut dengan universalisme. Yang ada adalah partikularitas, pluralitas dan keragaman. Mazhab Frankfurt melihat kebenaran sebagai suatu yang sifatnya tetap dan tidak mungkin dapat dirubah lagi. Kebenaran sejati adalah kebenaran yang nisbi dan memayungi segala bentuk pergerakan kehidupan manusia. Sementara, postmodernisme menegaskan bahwa tidak ada kebenaran sejati karena yang disebut dengan kebenaran itu sebenarnya hanyalah interpretasi manusia atas realitas itu sendiri. Kebenaran hanyalah hasil konstruksi bahasa manusia. Dalam hal ini, postmodernisme menganut paham relativisme.

Merujuk pada dialektika ini, mazhab Pendidikan Kritis mengambil unsur-unsur konstruktif dari mazhab Frankfurt dan postmodernisme, yang kemudian diadaptasi untuk merancang satu bentuk pendidikan kritis. Pendidikan kritis ini dijadikan sebagai medium bagi kritik sosial dan sekaligus mampu menawarkan kemungkinan-kemungkinan dikembangkannya ruang publik demokratis (*democratic public spheres*) (Morrison, 2003, Thahjadi, 2004). Dua hal yang ditekankan dalam mazhab ini adalah pemberdayaan diri (*self-empowerment*) dan refleksi diri (*self-reflection*). Dua hal ini merupakan titik tolak untuk melakukan transformasi sosial dan pembentukan tatanan masyarakat yang beradab.

Salah satu tema pokok mazhab pendidikan kritis adalah tentang kapitalisme karena pengaruhnya yang besar dalam kehidupan masyarakat modern. Yang dilahirkan dari rahim kapitalisme adalah *culture of positivism* dan rasionalitas teknokratik/instrumental. Bentuk budaya dan model berpikir ini kemudian berpengaruh kuat pada konsep dan praksis pendidikan pada abad ini (Brubacher, 1974:78). Ilmu yang disampaikan kepada peserta didik dalam budaya ini adalah ilmu yang mengorientasikan mereka untuk beradaptasi dengan dunia masyarakat industri. Proses pembelajaran pun ditekankan pada upaya untuk mengakumulasi dan memiliki ilmu pengetahuan untuk kepentingan mengejar profit. Jadilah pembelajaran sebagai arena imposisi pengetahuan dari mereka yang menganggap tahu segalanya kepada mereka yang tidak mengetahui apa-apa (Calhoun, 1995). Lebih dari itu, dalam budaya positivisme, pengetahuan cenderung dipisahkan dari proses pembentukannya. Seolah-olah keduanya bisa dipisahkan. Pengetahuan dianggap seperti "barang jadi" yang siap ditelan peserta didik tanpa melalui proses seleksi dan refleksi bersama. Padahal kalau kita memakai perspektif Paulo Freire (1984) dalam *The Gnosiological Cycle of Knowledge*, proses pembentukan pengetahuan itu secara dialektis berkaitan erat dengan proses penerimaan (Delgaauw, 1988). Keduanya tidak bisa dipisahkan. Jika dipisahkan, maka pembelajaran sama saja mengabaikan unsur-unsur penting yang perlu dikembangkan di dalam diri peserta didik, seperti refleksi kritis, keingintahuan (*curiosity*) dan dialog.

Gagasan pendidikan kritis membuat antitesis terhadap budaya positivisme dan rasionalitas instrumental yang telah menjerat pendidikan pada derajat rendah. Pendidikan kritis mulai dari narasi keyakinan bahwa sekolah perlu memainkan peran signifikan dalam membentuk kehidupan politik dan kultural (Banks, 1993). Sekolah adalah media untuk menyiapkan dan melegitimasi bentuk-bentuk tertentu kehidupan sosial. Sementara itu, guru tidak dianggap sebagai pusat segalanya. Ia bukan satu-satunya sumber pemilik otoritas kebenaran dan pengetahuan. Dia bukan pemilik tunggal kelas. Hubungan guru-murid bukanlah bersifat vertikal seperti yang terjadi di pabrik yang mengidentifikasikan atasan-bawahan atau manajer-buruh, tapi bersifat horizontal dan egalitarian. Isi dan materi pembelajaran dalam pendidikan kritis tidaklah semata-mata hak prerogatif guru, kepala sekolah atau para ahli, tanpa melibatkan peserta didik. Pendekatan *bottom up* dan partisipatif lebih dipilih dalam mengonstruksi ini kurikulum pembelajaran

dengan menjadikan kehidupan peserta didik sebagai titik pijak.

Proses pembelajaran dalam pendidikan kritis lebih menekankan pada aspek 'bagaimana berpikir' (*how to think*) daripada 'berpikir apa' (*what to think*). Penekanan pada aspek *what to think* atau materi pembelajaran itu penting, tapi proses atau metodologi untuk mendekati materi itu lebih penting (Bean, 1996). Dengan demikian, proses berpikir, berdebat, berargumentasi, mengapresiasi pendapat orang lain, selama masa pembelajaran jauh lebih penting daripada materi pelajaran itu sendiri. Karena dalam proses itulah akan muncul kritisitas, *sharing ideas*, saling menghargai dan penilaian dan evaluasi terhadap pengetahuan. Penekanan aspek *how to think* akan bisa terlaksana jika yang dipakai dalam proses pembelajaran adalah metode dialogis. Dialog merupakan sarana humanis, sarana untuk menemukan jati diri sebagai manusia, sarana untuk memanusiakan manusia (Glaser, 1991). Proses dialog dibuat bukan untuk mencapai konsensus, tetapi lebih pada kesempatan bagi peserta didik untuk berpikir melalui perspektifnya, sehingga mereka memiliki kesadaran (*conscientization*) (Freire, 1984).

Konsientisasi adalah proses dimana manusia mempunyai kesadaran kritis (*critical awareness*) sehingga mampu melihat secara kritis berbagai kontradiksi, penyimpangan dan ketimpangan sosial yang ada di sekelilingnya dan kemudian ada kesadaran untuk mengubahnya (Henderson, 2013). Pendidikan kritis menganggap tujuan pendidikan adalah meningkatkan kesadaran peserta didik, dari kesadaran magis dan naif, menuju kesadaran kritis. Demi mendukung peningkatan kesadaran, ada tiga tahapan dasar dalam pendidikan (Gelder, 2000) yaitu: (1) *Naming*, yaitu tahap menanyakan sesuatu: *what is the problem?* Tahap ini merupakan latihan untuk mempertanyakan sesuatu, baik itu berkaitan dengan teks, realitas sosial ataupun struktur ekonomi-politik. (2) *Reflecting*, yaitu dengan mengajukan pertanyaan mendasar untuk mencari akan persoalan: *why is it happening?* Tahap ini dimaksudkan agar murid dibiasakan untuk tidak berpikir simplistik, tapi berpikir kritis dan reflektif. (3) *Acting*, yaitu proses pencarian alternatif untuk memecahkan persoalan: *what can be done to change the situation?* Ini merupakan tahapan praksis. Memang, refleksi dan aksi merupakan dua sisi dari satu koin yang sama dalam pendidikan kritis (*critical pedagogy*). Ketiga tahap ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pendidikan.

Sudah pasti tahapan-tahapan di atas menuntut pembiasaan dan

pemberdayaan yang intens dalam diri peserta didik. Pembiasaan dan pemberdayaan ini menjadi sangat penting karena pada dasarnya berpikir kritis merupakan salah satu model aktivitas kognitif yang menuntut keterampilan yang tinggi dalam mengembangkan dan mengaplikasikannya. Dalam sejarah perkembangan peradaban bangsa di dunia, kegiatan berpikir kritis ini sudah dilansir sebagai salah satu tumpuan dalam mengembangkan karakter manusia dan keadaban masyarakatnya. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa manusia yang memiliki potensi intelektual, memungkinkan dia bisa berpikir dalam mencermati kehidupannya.

Keterampilan berpikir kritis siswa penting sebagai bagian dari pembentukan karakter sebagai warga negara yang baik (McLaren, 1995). Berpikir kritis bermanfaat untuk mengusahakan terbentuknya kewarganegaraan yang baik dalam suatu masyarakat. Selain mampu berpikir kritis, sebagai warganegara yang baik, siswa bertanggung jawab untuk menjadi pemberi informasi yang rasional dalam mengurus hal-hal yang berkaitan masyarakat. Dalam hal ini, setiap siswa dituntut untuk memiliki keterampilan berpikir kritis tentang isu-isu publik dan berbagai kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Dalam hal ini, sebagai warga negara yang baik dan benar, siswa turut bertanggung jawab atas berbagai permasalahan-permasalahan bangsa dan negaranya (Martoella, 1976). Tanggung jawab ini menuntut seorang siswa untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilannya dalam mengkritisi berbagai kondisi dan situasi sosial yang menjadi dampak dari berbagai ketegangan ini. Untuk dapat memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik dan benar maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki ketahanan dan daya saing, mampu berpikir dan bersikap kritis, cerdas, adaptif, inovatif, transformatif, dan humanis.

Menurut saya, pembelajaran yang dimulai dengan mengajukan pertanyaan dasar seperti 'apa', 'siapa', 'kapan', 'dimana', 'mengapa terjadi begini-begitu', 'bagaimana kejadiannya', 'tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah atau meningkatkannya', 'apakah pantas saya melakukannya', mesti dipertimbangkan bila merujuk pada permasalahan akibat penetrasi digital yang masif di atas (bandingkan dengan konsep 'mengamati', 'menanya', dan 'menginformasikan' pada pendekatan Saintifik pada kurikulum 2013). Sebab pertanyaan-pertanyaan dasar ini menjadi pemicu bangkitnya keterampilan kritis dalam diri peserta didik. Memulai

sebuah kegiatan belajar dengan bertanya adalah embrio dari konstruksi berpikir kritis dan berpeluang untuk membentuk sistematika berpikir yang jelas dan terang (Tapung, 2018). Bila pembelajaran tidak membudayakan kegiatan bertanya maka kita masih terjebak dalam budaya positivisme dan sedang menghidupkan kembali rasionalitas instrumental, yang secara perlahan merajam kritisitas dalam diri siswa. Bila hal ini terjadi, maka jangan heran segala macam bentuk penetrasi negatif dalam segala pola akan dengan mudah mendestruksi kepribadian generasi milenial.

Rekomendasi

Sebagai penutup, saya menyampaikan beberapa catatan rekomendatif, yakni: (1) pengintegrasian pendidikan berbasis berpikir kritis sangat mendesak untuk dilakukan. Para pemangku kepentingan pendidikan mesti melihat permasalahan sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat, yang merupakan akibat dari penggunaan media sosial, sebagai dasar dalam membuat kebijakan strategis mengenai pendidikan yang berbasis berpikir kritis. Pendidikan harus menegaskan salah satu perannya sebagai fasilitas kritis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang kerap mengganggu kelancaran program pembangunan negara bangsa. (2) Sebagai bagian dari transformasi digital, kegiatan literasi media sosial harus terus digalakan dan diintegrasikan kegiatan pendidikan/pembelajaran (termasuk pembelajaran agama Katolik), baik secara formal di sekolah-sekolah, maupun informal dan non formal di keluarga, masyarakat dan tempat-tempat kursus/pelatihan. Transformasi dan literasi ini menjadi penting untuk memelekan peserta didik dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang kritis, cerdas, arif dan bijaksana. Unsur-unsur literasi dapat dielaborasi dalam sistem kurikulum, konten materi ajar, model dan strategi pembelajaran, sumber dan media pembelajaran, dan sistem evaluasi belajarnya. (3) Perlu sinergisitas peran keluarga, masyarakat, tokoh-tokoh agama dan sekolah dalam membuat sosialisasi, edukasi dan advokasi tentang dampak-dampak perkembangan teknologi informasi, lebih khusus media sosial. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka sistem kontrol terhadap kegiatan dan perkembangan kehidupan siswa berjalan lebih efektif dan efisien, terutama berhubungan dengan perkembangan belajar, relasi dengan sesama, dan responnya terhadap perkembangan teknologi informasi digital, dan dampak-dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Robert D (1987).** "Intellectual Development and the Understanding of Science: Applications of William Perry's Theory to Science Teaching." *Journal of The University of North Carolina at Charlotte.*, hal.56-58.<https://doi.org/10.1670/0159630930140311>.pdf
- Alfiyah, Nura, "Gara-gara Candu Internet", *Majalah Mingguan Tempo*, 25 Februari 2018.
- Banks, J.A. 1993. *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. Needham Heights, Massachusetts: Allyn and Bacon.<https://faculty.washington.edu/jbanks/>, diakses, 21 Februari 2016.
- Bean, John (1996).** "Helping Students Read Difficult Texts." *Engaging Ideas: The Professor's Guide to Integrating Writing, Critical Thinking, and Active Learning in the Classroom*. San Francisco: Jossey-Bass, 72 (5).
- Brubacher, John S. 1974. *A History of The Problems of Education*. New York and London, McGraw –Hill Book Company, Inc.
- Calhoun, C., 1995. *Critical Theory*. Cambridge, MA: Blackwell.
- Callawaert, S. 1999. "Philosophy of Education, Frankfurt Critical Theory and The Sociology of Pierre Bourdieu " dalam T. Popkewitz dan L. Fendler (eds), *Critical Theories In Education: Changing Terrains of Knowledge and Politics*, London: Routledge.
- Chomsky, N. 1978. *Human Rights and American Foreign Policy*. New York: Oxford University.
- Delgaauw, Bernad, 1988. *Filsafat Abad XX*. Yogyakarta: Tiara
- Delors, 1996. *Learning: The Treasure Within*, The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Place de Fontenoy, France.
- Ennis, Robert. H., 1996. *Critical Thinking*. USA :Prentice Hall, IncFacione, N.C, & Facione, P.A.
- Fisher, Alec. 2001. *Critical Thinking: Introduction*. UK: Cambridge University Press.
- Freire, Paulo, 1984. *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan* (diindonesiakan oleh Sindhunata), Jakarta: Gramedia.
- Fukuyama, Francis & Samuel P. Huntington, 2005. *The Future of The World Order (Masa Depan Peradaban dalam Cengkeraman Demokrasi Liberal versus Pluralisme)*, Yogyakarta: IRCiSod.

- Glaser, E. M., 1991. *An Experiment in the Development of Critical Thinking*. New York: Columbia University Teacher's College.
- Gardner, Howard, 2007. *Five Mind for the Future*. Harvard Business School Press; 1St Edition.
- Habermas, Juergen, 2002. *Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity*, ed. Eduardo Mendieta, MIT Press.
- Halx, M., & Reybold, L. E, 2005. *A Pedagogy of Force: Faculty Perspectives of Critical Thinking Capacity in Undergraduate Students*. The Journal of General Education.
- Henderson-Hurley, M., & Hurley, D. (2013). "Enhancing Critical Thinking Skills Among Authoritarian Students". *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, hal, 248-261. <https://pdfs.semanticscholar.org/f23a/b41aab075f73800e8c6f6a2d8a7c1679c600.pdf>
- Hidayat, Dody Nurdin Kalim, "Kecerdasan Buatan Bukan Ancaman", *Majalah Mingguan Tempo*, 15 Juli 2018.
- Hove, Genal, 2011. "Developing Critical Thinking Skills in the Senior High School Classroom" Retrieved June 21, 2016 <http://h08.cgpublisher.com/proposals/65/index.html>.
- Ira Shor & Paulo Freire, 1945. *Pedagogy for Liberation*. Bergin dan Garvey Publisher.
- Jaya, Petrus Redy & Ambros Leonangung Edu, 2018. "Media Literacy and Critical Ability of Students at Manggarai Regency", *International Proceeding*, UNJ.
- Kartono, Kartini, 2014. *Patologi Sosial* (Jilid 1). Rajawali Pers: Jakarta.
- Kinch, J.W., 1974. *Social Problems in the World Today's*. London : Addison-Wesley Publishing Company.
- Kincheloe, J.L., 2008. *Knowledge and Critical Pedagogy: An Introduction*, 3, Springer Science and Business Media B.V.
- Martorella, P.H., Beal, C.M., dan Bolick, 2005. *Teaching Social Studies in Middle and Secondary Schools*. Columbus, Ohio, New Jersey: Merrill Prentice Hall.
- McLaren, P., 1995. *Critical Pedagogy and Predatory Culture: Oppositional Politics in a Postmodern Era*. New York: Routledge.
- Morrison, K., 1995. "Habermas and The School Curriculum" *Tesis* yang tidak diterbitkan. School of Education, University of Durham.

- Morrison, K., 2003. "Jurgen Habermas", dalam Joy A. Palmer (ed), *50 Pemikir Pendidikan: Dari Piaget Sampai Masa Sekarang*. (Alih bahasa: Farid Assifa) Yogyakarta:Jendela.
- Newmann, F.M. 1991. "Promoting Higher Order Thinking in Social Studies:Overview of a study of 16 high school Departments. Theory and Research in Social Education, 4(19),324–340.
- Payong, Marsel dan Mantovanny Tapung, "Pembelajaran IPS SMP di Manggarai yang Belum Berbasis Critical Thinking", Surat Kabar Harian *Pos Kupang*, 26/09/2017.
- Popper, Karl P., 1950. *The Open Society and Its Enemies*. Princeton University Press: New Jersey.
- Russel, Bertrand, 2007. *The Problem of Philosophy*, (terjem.).Colombus, Ohio, New Jersey: Merrill Prentice Hall.
- Sulaiman, W.S.W., Rahman, W.R.A., & Dzulkifli, M.A., 2007. "Relationship Between Critical Thinking Dispositions, Perceptions towards Teachers, Learning Approaches and Critical Thinking Skills among High School Students". Retrieved September 29, 2016, from digital.library.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/2440/.../
- Tapung, Marianus Mantovanny, 2018. *Narasi Bangsa yang Tercecer; Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial dan Politik*. Bandung: Cendikia.
- Thahjadi, S..P.L. 2004. *Pertualangan Intelektual*, Yogyakarta: Kanisius.
- [Yang SC](#) dan [Chung TY](#), 2009. "Experimental study of Teaching Critical Thinking in Civic Education in Taiwanese Senior HighSchool. Retrieved July 12, 2016, (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17822582>)
- van Gelder, T., 2000. *The Efficacy of Undergraduate Critical Thinking Courses. A Survey in Progress*. Retrieved October 6, 2016, from <http://www.philosophy.unimelb.edu.au/reason/papers/efficacy.html>.
- Zevin, Jack. 2007. *Social Studies for The Twenty-First Century; Methods and Materials for Teaching in Middle and Secondary Schools*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- <http://www.beritasatu.com/tajuk/5650-tantangan-guru-di-era-milenial.html>
Kompas, 8 September 2018.
Suara Pembaruan, 27 November 2017.
Tempo.co, 16 Oktober 2018.